

RENJA
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Kecamatan Pungging Tahun 2026 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rancangan Renja ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2025



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	25
2.4 Reviu terhadap rancangan RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	43
BAB V Penutup	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja diAkhiri dengan tahapan penyusunan Ranwal Renja, Rancangan Renja, Rangkir Renja dan Renja.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Renja Tahun 2026 Kecamatan Pungging yang selanjutnya disingkat dengan Rankir Renja Kecamatan Pungging adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pungging Tahun 2025– 2029.

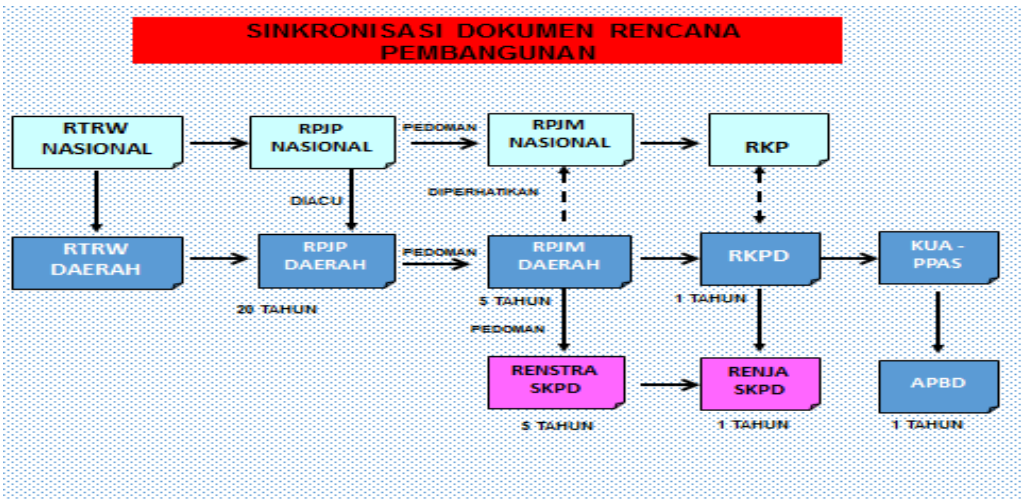
Sebagai dokumen perencanaan, Renja Kecamatan Pungging memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Rancangan Renja yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Mengacu pada Rancangan RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;

2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
29. Surat Keputusan Camat Pungging Nomor : 188.45/47.1/416-306/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru

sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil.

4. Langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kec. Pungging serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
- 4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Reviu terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Sajian Tabel T-C.31 Reviu Terhadap Rancangan RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN DAN DASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu) dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Sajian Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, pagu dana indikatif dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RENSTRA PD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Ranwal Renja dan Rencana Tindaklanjut Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Pungging pada tahun 2025 pada umumnya tercapai dengan baik Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagaimana table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran pada Kecamatan Pungging Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.499.123.000	2.392.114.773	96,38	107.008.227
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100	-
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.246.523.000	2.163.315.191	96,30	83.207.809
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.246.523.000	2.163.315.191	96,30	83.207.809
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.046.920	107.552.350	97,48	2.494.570
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.792.100	8.770.000	99,75	22.100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.560.400	3.560.000	99,99	400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	49.992.000	99,98	8.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.155.220	15.148.000	99,95	7.220
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.939.200	4.900.000	99,21	39.200
	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	12.882.350	85,88	2.117.650
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.600.000	12.300.000	97,62	300.000
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	-	-	-	-
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.404.480	67.375.091	86,22	20.385.248
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.000.000	53.614.752	72,45	20.385.248
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.404.480	13.404.480	100,00	-
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.148.600	49.228.000	98,21	920.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.898.600	37.158.000	98,05	740.600
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	7.450.000	99,33	50.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.750.000	4.620.000	97,26	130.000
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.459.400	13.460.770	93,09	998.630
A.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.459.400	13.460.770	93,09	- 998.630
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	14.459.400	13.460.770	93,09	998.630
V.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	426.818.500	414.172.000	98,46	12.646.500
A.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	426.818.500	414.172.000	98,46	12.646.500
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa	21.810.000	21.798.000	99,94	12.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	29.220.000	29.185.000	99,88	35.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Daerah dengan Pembangunan Desa				
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	275.742.800	265.321.000	96,22	10.421.800
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100.045.700	97.868.000	97,82	2.177.700
JUMLAH		2.940.400.900	2.819.747.543	95,90	120.653.357

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2025)

Kegiatan reviu evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C. 29) sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Pungging

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah sd 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5=n-3	6=n-2	7=n-2	8=(7/6)	9=n-1	10=(5+7+9) (n-1)	11=(10/4) (n-1)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	2	2	100%	2	-	-
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,7	77,53	82,50	82,59	100,11	82,50	82,59	100,11
7.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang		100%				100%		

		berlaku dan tepat waktu								
7.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		
7.01.01.02.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang dapat tersusun	20 laporan		20 laporan	20 laporan		20 laporan		
7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	95,90%	95,90%	95,90%	100%	100%		
7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN,	17 orang/bulan		17 orang/bulan	17 orang/bulan		17 orang/bulan		
7.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	88	-	88	88		88		
7.01.01.02.05.02	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	17 orang/bulan		17 orang/bulan	17 orang/bulan		17 orang/bulan		
7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	98,35%	100%	100%		100%		

7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : Lampu TL, saklar, stopkontak dll	1 paket		1 paket	1 paket		1 paket		
7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : Lampu TL, saklar, stopkontak dll	5 paket		5 paket	5 paket		5 paket		
7.01.01.02.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah wpaketpenyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket		12 paket	12 paket		12 paket		
7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	2 paket		2 paket	2 paket		2 paket		
7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		
7.01.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan:	2 paket		2 paket	2 paket		2 paket		

		kertas, tinta, ballpoint, map dll								
7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		12 laporan	12 laporan		12 laporan		
7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	1001%	97,57%	100%	100%		100%		
7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	24 laporan		24 laporan	24 laporan		24 laporan		
7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	12 laporan		12 laporan	12 laporan		12 laporan		
7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tercapai sesuai target	100%	98,97%	100%	100%		100%		
7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas	5 unit		5 unit	5 unit		5 unit		

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan								
7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit		3 unit	3 unit		3 unit		
7.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	10 unit		10 unit	10 unit		10 unit		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-	100%	100%		100%		
	Pengadaan Mebel		1 paket		1 paket	1 paket		1 paket		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai Standart Pelayanan		81				81%		
7.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang terlayani sesuai Standart Pelayanan	100%	3.600 pelayanan	100%	100%		100%		
7.01.02.02.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Nonperizinan yang terlayani	800 pelayanan		800 pelayanan	10.069 pelayanan		10.069 pelayanan		

		sesuai Standar Pelayanan								
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	82%	82%	100%		100%		
7.01.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 dokumen	76 fasilitasi	23 dokumen	23 dokumen		23 dokumen		
7.01.06.02.01,02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen		8 dokumen	8 dokumen		8 dokumen		
7.01.06.02.01,09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen		5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		
7.01.06.02.01,14	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen		5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		

7.01.06.02.01,12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen		5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		
------------------	--	---	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada **Misi 1** sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pungging

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2025)

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pungging
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1	2	3	4	6	7		8	9	10	11	12	13
1.	IKM Kecamatan	-	-	80,5	81	81,5	82	90,12	90,25	81,5	82	Baik
2.	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	82%	83%	84%	85%	100%	100%	84%	85%	Baik
3.	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	82%	83%	84%	85%	100%	100%	84%	85%	Baik
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	79,7	80,6	81,5	82,4	79,68	82,59	81,5	82,4	Baik
5.	Pesentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	93,18%	95,90	100%	100%	Baik
6.	Indeks profesionalitas ASN	-	-	80,5	81	81,5	82	87,34	-	81,5	82	Baik
7.	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	Baik

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2025)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pungging

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Pungging diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) strategis yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Pungging.

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Pungging bekerja dan memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di kantor Kecamatan Pungging yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Pungging;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen–dokumen perencanaan.

a. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Pungging namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

3. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
4. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
5. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
6. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Insfrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
8. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Pungging yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi Kecamatan Pungging untuk dapat meningkatkan pelayanan secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4. Reviu terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan 22able22 budaya yang berdimensi

kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diAkhiri dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2022-2024 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2024. Selengkapnya sebagaimana 23able 2.5 (T-C.31) sebagai berikut :

Tabel 2.5
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pungging	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	2.526.496.450	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pungging	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	2.526.496.450	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target	100%	4.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target	100%	4.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2.000.000	
	- Ranwal renja			1 dokumen		- Ranwal renja			1 dokumen		

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Rancangan Renja			1 dokumen		-Rancangan Renja			1 dokumen		
	-Rangkir Renja			1 dokumen		-Rangkir Renja			1 dokumen		
	-Renja			1 dokumen		-Renja			1 dokumen		
	-Rancangan Perubahan Renja			1 dokumen		-Rancangan Perubahan Renja			1 dokumen		
	-Perubahan Renja			1 dokumen		-Perubahan Renja			1 dokumen		
	-Reviu Renstra			1 dokumen		-Reviu Renstra			1 dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	2.000.000	
	-Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan			4 laporan		-Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan			4 laporan		
	-Penyusunan Dokumen LkjIP			1 laporan		-Penyusunan Dokumen LkjIP			1 laporan		
	-Penyusunan Dokumen LRA			12 laporan		-Penyusunan Dokumen LRA			12 laporan		

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Penyusunan Dokumen CALK			1 laporan		-Penyusunan Dokumen CALK			1 laporan		
	-Penyusunan Dokumen SAKIP			1 laporan		-Penyusunan Dokumen SAKIP			1 laporan		
	-Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi			1 laporan		-Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi			1 laporan		
	-Sinergitas Kecamatan			1 laporan		-Sinergitas Kecamatan			1 laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	2.289.236.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	2.289.236.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	2.289.236.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	2.289.236.000	
	-Penyediaan Gaji ASN			17 orang/bulan		-Penyediaan Gaji ASN			17 orang/bulan		
	-Penyediaan Tunjangan ASN			17 orang/bulan		-Penyediaan Tunjangan ASN			17 orang/bulan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	0	

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Dokumen Prognosis			2 dokumen					2 dokumen		
	-Dokumen Belanja Fungsional			12 dokumen					12 dokumen		
	-Dokumen Rekonsiliasi Aset			12 dokumen					12 dokumen		
	-Dokumen Rekonsiliasi Akuntansi			12 dokumen					12 dokumen		
	-Berita Acara Cash Opname			1 dokumen					1 dokumen		
	-Berita Acara Opname Persediaan			1 dokumen					1 dokumen		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81,5	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81,5	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0	
	-Seragam Hitam Putih			1 paket		-Seragam Hitam Putih			1 paket		
	Pendidikan dan pelatihan pegawai		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	17 orang	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	17 orang	0	

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	berdasarkan tugas dan fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			berdasarkan tugas dan fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	-Bimtek Peningkatan ASN			17 orang					17 orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	87.553.670	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	87.553.670	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.860.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.860.950	
	-Lampu , Kabel , Komponen Listrik Lainnya			1 paket		-Lampu , Kabel , Komponen Listrik Lainnya			1 paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.328.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.328.000	
	-kursi pejabat					-kursi pejabat					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	35.970.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 paket	35.970.000	

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Disediakan			
	-Makanan dan Minuman Rapat			12 paket		-Makanan dan Minuman Rapat			12 paket		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.546.220	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.546.220	
	-foto copy , Cetak Lembar SPPD , Cetak Amplop Dinas , Cetak Map Dinas , Cetak Kop Dinas			2 paket		-foto copy , Cetak Lembar SPPD , Cetak Amplop Dinas , Cetak Map Dinas , Cetak Kop Dinas			2 paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.196.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.196.000	
	-Koran dan majalah			12 dokumen		-Koran dan majalah			12 dokumen		
	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	9.052.500	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	9.052.500	
	- ATK			2 paket		- ATK			2 paket		

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12.600.000	
	-SPPD			12 laporan		-SPPD			12 laporan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan	100%	75.028.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan	100%	75.028.880	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	61.624.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	61.624.400	
	-Listrik Kantor			12 laporan		-Listrik Kantor			12 laporan		
	-Kebutuhan Telepon			12 laporan		-Kebutuhan Telepon			12 laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 laporan	13.404.480	

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Umum Kantor yang Disediakan		13.404.480			Umum Kantor yang Disediakan			
	-Tenaga Administrasi Kantor (1 orang)			12 laporan		-Tenaga Administrasi Kantor (1 orang)			12 laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	70.677.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	70.677.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	57.694.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	57.694.700	
	-Pajak			2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)		-Pajak			2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)		
	-BBM			1 Unit (1 Mobil)		-BBM			1 Unit (1 Mobil)		

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Biaya service			1 Unit (1 Mobil)		-Biaya service			1 Unit (1 Mobil)		
	-sparepart			1 Unit (1 Mobil)		-sparepart			1 Unit (1 Mobil)		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	7.703.200	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	7.703.200	
	-Pemeliharaan Gedung			1 unit		-Pemeliharaan Gedung			1 unit		
	-Pemeliharaan Pendopo			1 unit		-Pemeliharaan Pendopo			1 unit		
	-Pemeliharaan Mushola			1 unit		-Pemeliharaan Mushola			1 unit		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan 32able32 kantor	3 unit	5.280.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan 32able32 kantor	3 unit	5.280.000	

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll			4 unit		-Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll			4 unit		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Pungging	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	21.137.500	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Pungging	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	21.137.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1.000 Pelayan an	21.137.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1.000 Pelayan an	21.137.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	16 Lapora n	21.137.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	16 Laporan	21.137.500	
	-SKM (mendukung Program Bupati pada Misi 3)			1 Lapora n		-SKM (mendukung Program Bupati pada Misi 3)			1 Laporan		
	-Sosialisasi Bidang Pelayanan			1 Lapora n		-Sosialisasi Bidang Pelayanan			1 Laporan		
	-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan			2 Lapora n		-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan			2 Laporan		

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Evaluasi Pelayanan			12 laporan		-Evaluasi Pelayanan			12 laporan		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pungging	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	226.802.050	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pungging	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	226.802.050	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	23 dokumen	226.802.050	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	23 dokumen	226.802.050	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	30.422.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	30.422.000	
	-Asistensi Penyusunan LPJ			19 Dokumen (Jumlah Desa)		-Asistensi Penyusunan LPJ			19 Dokumen (Jumlah Desa)		
	-Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa			19 Dokumen (Jumlah		-Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa			19 Dokumen (		

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				h Desa)					Jumlah Desa)		
	-Asistensi Penyusunan Produk Hukum Desa			19 Dokumen (Jumlah h Desa)		-Asistensi Penyusunan Produk Hukum Desa			19 Dokumen (Jumlah Desa)		
	-Asistensi Penatausahaan Desa			19 Dokumen (Jumlah h Desa)		-Asistensi Penatausahaan Desa			19 Dokumen (Jumlah Desa)		
	-Asistensi Perubahan APBDes			19 Dokumen (Jumlah h Desa)		-Asistensi Perubahan APBDes			19 Dokumen (Jumlah Desa)		
	-Asistensi Penyusunan APBDes			19 Dokumen (Jumlah h Desa)		-Asistensi Penyusunan APBDes			19 Dokumen (Jumlah Desa)		
	- Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa			19 Dokumen (Jumla		- Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa			19 Dokumen (		

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				h Desa)					Jumlah Desa)		
	-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan			19 Dokumen (Jumlah h Desa)		-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan			19 Dokumen (Jumlah Desa)		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	35.198.500	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	35.198.500	
	-Musrenbang			1 dokumen		-Musrenbang			1 dokumen		
	-Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan			1 dokumen		-Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan			1 dokumen		
	-Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa			1 dokumen		-Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa			1 dokumen		
	-Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Desa			1 dokumen		-Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Desa			1 dokumen		

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa			1 dokumen		-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa			1 dokumen		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	43.777.350	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	43.777.350	
	-Honorarium Tim Forkopimca (danramil dan kapolsek)			1 dokumen		-Honorarium Tim Forkopimca (danramil dan kapolsek)			1 dokumen		
	-Apel Linmas			1 dokumen		-Apel Linmas			1 dokumen		
	-Pemantauan dan Pengamanan Wilayah			1 dokumen		-Pemantauan dan Pengamanan Wilayah			1 dokumen		
	-Tanggap Bencana			1 dokumen		-Tanggap Bencana			1 dokumen		

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Penertiban dan Penegakan Perda			1 dokumen		-Penertiban dan Penegakan Perda			1 dokumen		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	117.404.200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	117.404.200	
	-Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat			1 dokumen		-Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat			1 dokumen		
	-Hibah Sapi			1 dokumen		-Hibah Sapi			1 dokumen		
	-Pemberdayaan Masyarakat (salah satunya mendukung KLA ; mendukung Program Prioritas BUPATI (ODF))			1 dokumen		-Pemberdayaan Masyarakat (salah satunya mendukung KLA ; mendukung Program Prioritas BUPATI (ODF))			1 dokumen		
	-Fasilitasi Bantuan Sosial			1 dokumen		-Fasilitasi Bantuan Sosial			1 dokumen		

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-PKK			1 dokumen		-PKK			1 dokumen		
					2.774.236.000					2.774.236.000	

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2025)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Program/kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitian dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, antara lain :

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diakhiri dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengakhiri usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2025 adalah sebagaimana 40able 2.6 (T-C. 32) berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2026
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pungging	-	1 ekor	Hibah Sapi Qurban

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2025)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pungging ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025 – 2029, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kecamatan Pungging menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu : **Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: **“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”**. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pungging, dalam hal ini Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029. Sasaran merupakan bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pungging menetapkan sasaran strategi **“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”**.

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	81	81,5	82	82,5	83	83,5

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2024)

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Kecamatan Pungging yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2026. Renja Kecamatan Pungging merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pungging.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pungging Tahun 2026 mengacu pada Tujuan Kecamatan Pungging yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pungging untuk 5 Tahun mendatang yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dari Kecamatan Pungging Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.2 (T-C.33) sebagai berikut :

Table 3.2 (Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Loka si	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Su mb er Dan a		Targ et Capai an Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Unsur Kewilayahan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kec. Pung ging	1 Inova si	2.526.496.4 50			1 Inov asi	2.526.496.4 50
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82,60				82,6 0	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target		100%	4.000.000			100 %	4.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 doku men	2.000.000			7 doku men	2.000.000
	- Ranwal renja			1 doku men				1 doku men	
	-Rancangan Renja			1 doku men				1 doku men	
	-Rangkir Renja			1 doku men				1 doku men	
	-Renja			1 doku men				1 doku men	
	-Rancangan Perubahan Renja			1 doku men				1 doku men	
	-Perubahan Renja			1 doku men				1 doku men	
	-Reviu Renstra			1 doku men				1 doku men	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 laporan	2.000.000			21 laporan	2.000.000
	-Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan			4 laporan				4 laporan	
	-Penyusunan Dokumen LKjIP			1 laporan				1 laporan	
	-Penyusunan Dokumen LRA			12 laporan				12 laporan	
	-Penyusunan Dokumen CALK			1 laporan				1 laporan	
	-Penyusunan Dokumen SAKIP			1 laporan				1 laporan	
	-Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi			1 laporan				1 laporan	
	-Sinergitas Kecamatan			1 laporan				1 laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		100%	2.289.236.000			100%	2.289.236.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 orang/bulan	2.289.236.000			17 orang/bulan	2.289.236.000
	-Penyediaan Gaji ASN			17 orang/bulan				17 orang/bulan	
	-Penyediaan Tunjangan ASN			17 orang/bulan				17 orang/bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		40 dokumen	0			40 dokumen	0
	-Dokumen Prognosis			2 dokumen				2 dokumen	
	-Dokumen Belanja Fungsional			12 dokumen				12 dokumen	
	-Dokumen Rekonsiliasi Aset			12 dokumen				12 dokumen	
	-Dokumen Rekonsiliasi Akuntansi			12 dokumen				12 dokumen	

	-Berita Acara Cash Opname			1 doku men				1 doku men	
	-Berita Acara Opname Persediaan			1 doku men				1 doku men	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		81,5	0			81,5	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	0			1 paket	0
	-Seragam Hitam Putih			1 paket				1 paket	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		17 orang	0			17 oran g	0
	-Bimtek Peningkatan ASN			17 orang				17 oran g	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan		100%	87.553.670			100 %	87.553.670
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	8.860.950			1 paket	8.860.950
	-Lampu , Kabel , Komponen Listrik Lainnya			1 paket				1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	5.328.000			1 paket	5.328.000
	-kursi pejabat								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	35.970.000			12 paket	35.970.000
	-Makanan dan Minuman Rapat			12 paket				12 paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	10.546.220			2 paket	10.546.220
	-foto copy , Cetak Lembar SPPD , Cetak Amplop Dinas , Cetak Map Dinas , Cetak Kop Dinas			2 paket				2 paket	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen	5.196.000			12 dokumen	5.196.000
	-Koran dan majalah			12 dokumen				12 dokumen	
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2 paket	9.052.500			2 paket	9.052.500
	- ATK			2 paket				2 paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	12.600.000			12 laporan	12.600.000
	-SPPD			12 laporan				12 laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan		100%	75.028.880			100 %	75.028.880
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 laporan	61.624.400			24 laporan	61.624.400
	-Listrik Kantor			12 laporan				12 laporan	
	-Kebutuhan Telepon			12 laporan				12 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	13.404.480			12 laporan	13.404.480
	-Tenaga Administrasi Kantor (1 orang)			12 laporan				12 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	70.677.900			100 %	70.677.900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 unit	57.694.700			2 unit	57.694.700

	-Pajak			2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)				2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)	
	-BBM			1 Unit (1 Mobil)				1 Unit (1 Mobil)	
	-Biaya service			1 Unit (1 Mobil)				1 Unit (1 Mobil)	
	-sparepart			1 Unit (1 Mobil)				1 Unit (1 Mobil)	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	7.703.200			3 unit	7.703.200
	-Pemeliharaan Gedung			1 unit				1 unit	
	-Pemeliharaan Pendopo			1 unit				1 unit	
	-Pemeliharaan Mushola			1 unit				1 unit	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		3 unit	5.280.000			3 unit	5.280.000
	-Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll			4 unit				4 unit	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Pungging	100%	21.137.500			100 %	21.137.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		1.000 Pelayanan	21.137.500			1.000 Pelayanan	21.137.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		16 Laporan	21.137.500			16 Laporan	21.137.500

	-SKM (mendukung Program Bupati pada Misi 3)			1 Lapor an				1 Lapo ran	
	-Sosialisasi Bidang Pelayanan			1 Lapor an				1 Lapo ran	
	-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan			2 Lapor an				2 Lapo ran	
	-Evaluasi Pelayanan			12 lapora n				12 lapor an	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kec. Pungging	100%	226.802.050			100%	226.802.050
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		23 doku men	226.802.050			23 doku men	226.802.050
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 doku men	30.422.000			8 doku men	30.422.000
	-Asistensi Penyusunan LPJ			19 Doku men (Jumla h Desa)				19 Doku men (Juml ah Desa)	
	-Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa			19 Doku men (Jumla h Desa)				19 Doku men (Juml ah Desa)	
	-Asistensi Penyusunan Produk Hukum Desa			19 Doku men (Jumla h Desa)				19 Doku men (Juml ah Desa)	
	-Asistensi Penatausahaan Desa			19 Doku men (Jumla h Desa)				19 Doku men (Juml ah Desa)	
	-Asistensi Perubahan APBDes			19 Doku men (Jumla h Desa)				19 Doku men (Juml ah Desa)	

	-Asistensi Penyusunan APBDes			19 Doku men (Jumla h Desa)				19 Doku men (Jumla h Desa)	
	- Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa			19 Doku men (Jumla h Desa)				19 Doku men (Jumla h Desa)	
	-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan			19 Doku men (Jumla h Desa)				19 Doku men (Jumla h Desa)	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 doku men	35.198.500			5 doku men	35.198.500
	-Musrenbang			1 doku men				1 doku men	
	-Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan			1 doku men				1 doku men	
	-Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa			1 doku men				1 doku men	
	-Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Desa			1 doku men				1 doku men	
	-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa			1 doku men				1 doku men	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 doku men	43.777.350			5 doku men	43.777.350
	-Honorarium Tim Forkopimca (danramil dan kapolsek)			1 doku men				1 doku men	
	-Apel Linmas			1 doku men				1 doku men	
	-Pemantauan dan Pengamanan Wilayah			1 doku men				1 doku men	

	-Tanggap Bencana			1 doku men				1 doku men	
	-Penertiban dan Penegakan Perda			1 doku men				1 doku men	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		5 doku men	117.404.200			5 doku men	117.404.200
	-Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat			1 doku men				1 doku men	
	-Hibah Sapi			1 doku men				1 doku men	
	-Pemberdayaan Masyarakat (salah satunya mendukung KLA ; mendukung Program Prioritas BUPATI (ODF))			1 doku men				1 doku men	
	-Fasilitasi Bantuan Sosial			1 doku men				1 doku men	
	-PKK			1 doku men				1 doku men	
	JUMLAH				2.774.236.000				2.774.236.000

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2025)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah

ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Perangkat Daerah.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tahun 2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026
KECAMATAN PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA SKPD : KECAMATAN PUNGGING

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotora	-	B	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi		2.526.496.450					
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82,60	Kec. Pungging		-	0	-	0	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target		100%	Kec. Pungging	4.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	Kec. Pungging	2.000.000	-	0	-	0	-

		- Ranwal renja					1 dokum en							
		-Rancangan Renja					1 dokum en							
		-Rangkir Renja					1 dokum en							
		-Renja					1 dokum en							
		-Rancangan Perubahan Renja					1 dokum en							
		-Perubahan Renja					1 dokum en							
		-Reviu Renstra					1 dokum en							
	7.01.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 laporan	Kec. Punggi ng	2.000.000	-	0	-	0	-
		-Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan					4 laporan							

		-Penyusunan Dokumen LKjIP					1 laporan							
		-Penyusunan Dokumen LRA					12 laporan							
		-Penyusunan Dokumen CALK					1 laporan							
		-Penyusunan Dokumen SAKIP					1 laporan							
		-Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi					1 laporan							
		-Sinergitas Kecamatan					1 laporan							

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		100%	Kec. Pungging	2.289.236.000					
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 orang/bulan	Kec. Pungging	2.289.236.000	-	0	-	0	-
		-Penyediaan Gaji ASN					17 orang/bulan							
		-Penyediaan Tunjangan ASN					17 orang/bulan							
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		L	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		40 dokumen	Kec. Pungging	0	-	0	-	0	-
		-Dokumen Prognosis					2 dokumen							

		-Dokumen Belanja Fungsional					12 dokum en							
		-Dokumen Rekonsiliasi Aset					12 dokum en							
		-Dokumen Rekonsiliasi Akuntansi					12 dokum en							
		-Berita Acara Cash Opname					1 dokum en							
		-Berita Acara Opname Persediaan					1 dokum en							
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		L	IP ASN Perangkat Daerah		81,5	Kec. Pungging	0	-	0	-	0	-

	7.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		L	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	Kec. Pungging	0	-	0	-	0	-
		-Seragam Hitam Putih					1 paket							
	7.01.01.2.05.01	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		L	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		17 orang	Kec. Pungging	0	-	0	-	0	-
		-Bimtek Peningkatan ASN					17 orang							
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan		100%	Kec. Pungging	87.553.670	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		L	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	Kec. Pungging	8.860.950	-	0	-	0	-

		-Lampu , Kabel , Komponen Listrik Lainnya					1 paket							
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	Kec. Pungging	5.328.000	-	0	-	0	-
		-kursi pejabat												
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	Kec. Pungging	35.970.000	-	0	-	0	-
		-Makanan dan Minuman Rapat					12 paket							
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	Kec. Pungging	10.546.220	-	0	-	0	-

		-foto copy , Cetak Lembar SPPD , Cetak Amplop Dinas , Cetak Map Dinas , Cetak Kop Dinas					2 paket							
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		L	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen	Kec. Pungging	5.196.000	-	0	-	0	-
		-Koran dan majalah					12 dokumen							
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material		L	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2 paket	Kec. Pungging	9.052.500	-	0	-	0	-
		- ATK					2 paket							
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	Kec. Pungging	12.600.000	-	0	-	0	-

		-SPPD					12 laporan							
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan		100%	Kec. Pungging	75.028.880	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 laporan	Kec. Pungging	61.624.400	-	0	-	0	-
		-Listrik Kantor					12 laporan							
		-Kebutuhan Telepon					12 laporan							
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	Kec. Pungging	13.404.480	-	0	-	0	-

		-Tenaga Administrasi Kantor (1 orang)					12 laporan							
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	Kec. Pungging	70.677.900	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 unit	Kec. Pungging	57.694.700	-	0	-	0	-
		-Pajak					2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)							
		-BBM					1 Unit (1 Mobil)							
		-Biaya service					1 Unit (1 Mobil)							

		-sparepart					1 Unit (1 Mobil)							
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	Kec. Pungging	7.703.200	-	0	-	0	-
		-Pemeliharaan Gedung					1 unit							
		-Pemeliharaan Pendopo					1 unit							
		-Pemeliharaan Mushola					1 unit							
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		3 unit	Kec. Pungging	5.280.000					

		-Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll					4 unit							
	7.01.02.2.0 4.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		L	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	Kec. Pungging	21.137.500	-	0	-	0	-
	7.01.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		L	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		1.000 Pelaya nan	Kec. Pungging	21.137.500	-	0	-	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		L	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		16 Laporan	Kec. Pungging	21.137.500	-	0	-	0	-
		-SKM (mendukung Program Bupati pada Misi 3)					1 Laporan							
		-Sosialisasi Bidang Pelayanan					1 Laporan							

		-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan					2 Laporan							
		-Evaluasi Pelayanan					12 laporan							
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti		100%	Kec. Pungging	226.802.050	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		23 dokumen	Kec. Pungging	226.802.050	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		L	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 dokumen	Kec. Pungging	30.422.000	-	0	-	0	-
		-Asistensi Penyusunan LPJ					19 Dokumen (Jumlah Desa)							

		-Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa					19 Dokumen (Jumlah Desa)							
		-Asistensi Penyusunan Produk Hukum Desa					19 Dokumen (Jumlah Desa)							
		-Asistensi Penatausahaan Desa					19 Dokumen (Jumlah Desa)							
		-Asistensi Perubahan APBDes					19 Dokumen (Jumlah Desa)							
		-Asistensi Penyusunan APBDes					19 Dokumen (Jumlah Desa)							
		- Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa					19 Dokumen (Jumlah Desa)							

		-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan					19 Dokumen (Jumlah Desa)							
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 dokumen	Kec. Pungging	35.198.500	-	0	-	0	-
		-Musrenbang					1 dokumen							
		-Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan					1 dokumen							
		-Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa					1 dokumen							
		-Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Desa					1 dokumen							

		-Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa					1 dokumen							
	7.01.06.2.01 .11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 dokumen	Kec. Pungging	43.777.350	-	0	-	0	-
		-Honorarium Tim Forkopimca (danramil dan kapolsek)					1 dokumen							
		-Apel Linmas					1 dokumen							
		-Pemantauan dan Pengamanan Wilayah					1 dokumen							
		-Tanggap Bencana					1 dokumen							

		-Penertiban dan Penegakan Perda					1 dokumen							
	7.01.06.2.01 .12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		5 dokumen	Kec. Pungging	117.404.200	-	0	-	0	-
		-Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat					1 dokumen							
		-Hibah Sapi					1 dokumen							
		-Pemberdayaan Masyarakat (salah satunya mendukung KLA ; mendukung Program Prioritas BUPATI (ODF))					1 dokumen							
		-Fasilitasi Bantuan Sosial					1 dokumen							

		-PKK					1 dokumen							
		JUMLAH							2.774.236.000					

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2025)

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pungging, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Pungging, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

1.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2026 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

1.2. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Pungging diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harap.



AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM.
Pembina
NIP. 19780610 199809 1 001